

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia telah diimplementasikan sejak tahun 1999, dengan tujuan untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait pembangunan di wilayahnya. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan aspirasi serta kebutuhan lokal agar tercapai kesejahteraan masyarakat setempat secara lebih efektif dan efisien. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pemerintahan daerah. Namun, selain meningkatkan partisipasi masyarakat, otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. (Awal, dkk. 2024 : 43).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6) Definisi Otonomi daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di Kabupaten Pasuruan merupakan bagian pelaksana dari pemerintahan daerah dalam sektor kependudukan dan pencatatan sipil. Dispendukcapil memiliki tanggung jawab penuh untuk

mendukung kepala daerah kabupaten pasuruan dalam mengelola sebagian aktivitas pemerintahan serta Pembangunan, terutama yang berhubungan dengan pendaftaran dan pencatatan warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Permenpan RB No 91 Tahun 2021 pasal 1 secara jelas menetapkan kebijakan pelaksanaan inovasi dalam pelayanan publik sebagai komponen kunci dalam usaha untuk meningkatkan mutu layanan bagi masyarakat. Kebijakan dalam pelayanan publik mencakup serangkaian kegiatan yang memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk terkait barang, jasa dan layanan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jaringan inovasi antar lembaga di bangun sebagai platform kolaborasi untuk memperkuat pengembangan inovasi, kebijakan ini memberikan peran penting dalam transformasi dan modernisasi dalam pelayanan publik melalui inovasi yang terencana dan berkelanjutan, serta dukungan penuh dari instansi sebagai pengelolaan pelayanan publik, sehingga layanan yang diberikan menjadi lebih efektif, efisien, dan berfokus kepada kepuasan masyarakat.

Dalam bidang administrasi kependudukan memiliki posisi yang sangat penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel menjadi tolak ukur keberhasilan birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Namun demikian, penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain

keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2022).

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan meluncurkan sebuah program inovatif bernama Program My Darling (Melayani Dokumen Administrasi Kependudukan dan Perekaman Keliling). Program ini merupakan bentuk pelayanan jemput bola yang bertujuan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat secara langsung. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dispendukcapil.

Pelaksanaan Program My Darling sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif. Selain itu, program ini juga merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara *daring*, yang menekankan pentingnya digitalisasi serta mobilitas pelayanan untuk mewujudkan efisiensi dan pemerataan akses pelayanan publik.

Dengan hadirnya program ini, pemerintah daerah berupaya mengatasi kendala jarak, biaya, dan waktu yang selama ini menjadi

hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan. Inovasi ini juga mendukung prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek efektivitas, efisiensi, dan pemerataan pelayanan publik. Program My Darling diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Program My Darling (Melayani Dokumen Administrasi Kependudukan dan Perekaman Keliling) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program My Darling (Melayani Dokumen Administrasi Kependudukan dan Perekaman Keliling) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diturunkan oleh penulis ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program My Darling (Melayani Dokumen Administrasi Kependudukan dan Perekaman Keliling) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

2. Dan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program tersebut dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan dan wawasan tentang penerapan kebijakan publik, khususnya dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi atau acuan bagi mahasiswa untuk mempelajari tentang implementasi inovasi pelayanan publik di instansi pemerintah daerah lebih khususnya dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini Adalah agar dapat membantu dalam menambah pengetahuan, wawasan, dan memperjelas tentang bagaimana implementasi kebijakan program my darling di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

1. Bagi Pemerintah: Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi saran bagi pemerintah daerah, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, agar pelaksanaan Program My Darling bisa berjalan lebih baik, cepat, dan tepat sasaran.

2. Bagi Peneliti Lain : dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin membahas topik tentang pelayanan publik atau kebijakan pemerintah.
3. Bagi Peneliti : sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir agar mendapatkan gelar sarjana pada Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

